

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA PEDULI GAMBUT (DPG/RESTORASI GAMBUT) DI DESA PULANTANI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Rafi'i Hamdi¹, Agus Sya'bani Arlan², Siti Raudah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email :rafiihamdi@gmail.com

ABSTRAK

DPG/Restorasi Gambut adalah keharusan mengingat banyaknya kerusakan pada ekosistem gambut namun pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Desa Peduli Gambut/Restorasi Gambut di desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yaitu cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi gambut) di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang baik dilihat dari: Pertama, Transmisi belum sepenuhnya baik. Kedua, Staf dan fasilitasnya belum memadai. Ketiga, anggaran belum dipenuhi secara menyeluruh. Namun di samping itu, indikator disposisi dalam hal pengangkatan birokrat serta indikator fragmentasi pada implementasi program ini sudah berjalan dengan cukup baik. Dan Kepada Kepala Badan Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan sosialisasi. Kepada Kepala Desa masyarakat setempat merencanakan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasana dalam program DPG Restorasi Gambut. Khusus Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading.

Kata Kunci: Implementasi, Program Peduli Gambut.

ABSTRACT

DPG/Peat Restoration is a must considering the amount of damage to the peat ecosystem, but its implementation still has several problems. This study aims to determine the Implementation of the Peat Care Village Program/Peat Restoration in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. Qualitative descriptive research method. Data collection is by observation, interview and documentation. The Implementation of the Peat Care Village Program (DPG/Peat Restoration) in Pulantani Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency is not good, seen from: First, Transmission is not completely good. Second, Staff and facilities are not adequate. Third, the budget has not been fully fulfilled. However, in addition, the disposition indicator in terms of appointing bureaucrats and the fragmentation indicator in the implementation of this program have been running quite well. And to the Head of the Peat Restoration Agency in South Kalimantan Province, increase socialization. To the Village Head, the local community plans a budget to fulfill facilities and infrastructure in the DPG Peat Restoration program. Specifically for Pulantani Village, Haur Gading District.

Keywords: Implementation, Peat Care Program.

PENDAHULUAN

Lahan gambut mempunyai peranan penting terhadap lingkungan dalam mencegah kekeringan dan banjir pada irigasi pertanian. Selain itu, lahan gambut juga berperan penting dalam mencegah perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini karena gambut merupakan rumah bagi lebih dari 30% karbon dunia yang tersimpan di dalam tanah. Diperkirakan rawa di seluruh dunia menyimpan karbon dua kali lebih banyak daripada hutan dan empat kali lebih banyak dari atmosfer, sehingga pembakaran rawa melepaskan karbon dioksida dan gas lainnya ke atmosfer. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan masalah kesehatan yang serius. Pemadaman kebakaran hutan dan pedesaan telah dialihkan dari tingkat nasional ke Pemerintah atau pemerintah daerah perkotaan saja. Faktanya, "Desa", sebagai unit sosial dan administratif terkecil, merupakan otoritas

yang paling nyata dalam menangani bahaya kebakaran hutan dan lahan di ekosistem lahan gambut, hutan, dan rawa. Salah satu upaya utama pemerintah untuk “melindungi” lahan gambut adalah dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Gambut dapat menahan karbon di dalam tanah. Desa Pulantan menjadi tempat istimewa dalam penelitian ini karena terdapat dua rawa garam di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa implementasi program Turvehoitokylä di Desa Pulantan yang belum terlihat pada bidang pertanian rawa, peternakan dan perikanan rawa, kerajinan berbasis gambut, dan pengembangan wisata rawa. agar dapat berfungsi secara optimal. Restorasi gambut adalah keharusan mengingat banyaknya kerusakan lingkungan pada ekosistem gambut. Ekosistem ini sendiri bersifat unik sekaligus rentan. Areal bergambut mampu menyimpan air, menjadi habitat bagi sejumlah spesies, serta mampu menjadi pengendali perubahan iklim. Meski hanya mengisi 3% dari luasan daratan di muka bumi, lahan gambut dapat menyimpan 550 gigaton karbon. Jumlah ini setara dengan 75% karbon yang ada di atmosfer, atau dua kali jumlah karbon yang dikandung seluruh hutan non-gambut. Dari waktu ke waktu, ekosistem gambut di Indonesia terdegradasi. Sebagian besar daripadanya terjadi akibat pengeringan gambut dan kebakaran. Banyak salah kelola terjadi pada ekosistem gambut selama dua-tiga decade terakhir. Kubah-kubah gambut yang semestinya dilindungi karena kemampuannya menyimpan air, banyak yang dirusak. Pembangunan kanal yang tidak terencana dengan baik berujung pada pengeringan gambut. Akibat ini semua maka gambut menjadi rawan terbakar. Pada ekosistem yang berubah dan rentan inilah terdapat kehidupan sejumlah kelompok masyarakat. Jumlah desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut pada 7 provinsi prioritas restorasi gambut diperkirakan mencapai 2.945 desa. Sebagian besar dari desa- desa itu adalah desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutan merilis adanya 731 desa- desa rawan kebakaran tersebut. Sebagian berada didalam dan sekitar ekosistem gambut. Sementara itu di areal kurang lebih 2,49 juta hektar yang menjadi target restorasi diperkirakan ada 1.205 desa dan kelurahan.

BRG mempunyai fungsi untuk pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; perencanaan, pengendalian dan kerja sama; pemetaan kesatuan hidrologis gambut; penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (*rewetting*) gambut dan segala kelengkapannya; penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Dalam masa lima tahun, BRG menargetkan \pm 2 juta hektar gambut yang terestorasi di tujuh provinsi. Berdasarkan data yang dirilis BRG Indonesia memiliki hampir 15 juta hektare lahan gambut tropis. Dari luas itu, sebanyak 12,9 juta hectare berada di tujuh provinsi yang menjadi prioritas restorasi gambut. Kerusakan ekosistem gambut pada umumnya terjadi karena pembukaan dan pengeringan gambut. Akibatnya lahan dan rawa gambut menjadi rentan terbakar. Masih menurut data BRG, pada tahun 2015, kebakaran gambut mencapai 875 ribu hektare. Jumlah ini kurang lebih 33% dari luas seluruh areal hutan dan lahan yang terbakar. Sementara itu, ada sekitar 2,8 juta hektare kubah gambut yang telah dibuka dengan kanal-kanal buatan. Areal gambut tipis kurang dari tiga meter dan tidak berkubah namun juga telah mengalami pembukaan mencapai 3,1 juta hektare. Di luar itu masih ada 6,2 juta hektare kubah gambut yang masih baik, karenanya perlu dilindungi. Salah satu program strategis BRG untuk mencapai target restorasi itu adalah Desa Peduli Gambut (DPG), yang meliputi meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik, pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antar desa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiap- siagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. Agar program dan tujuan BRG tepat sasaran, DPG

membutuhkan data profil desa yang tidak hanya berupa peta (spasial), melainkan juga non spasial (profil manusia dari segi sosial, ekonomi dan potensi-potensi lainnya).

Desa Pulantani menjadi tempat spesifik dalam penelitian ini, dikarenakan dari 2 daerah lahan gambut yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di Desa Pulantani pun secara hasil observasi peneliti terdapat beberapa penyelenggaraan yang kegiatan dari program Desa Peduli Gambut, baik itu di bidang pertanian rawa gambut, peternakan & perikanan rawa gambut, kerajinan berbasis Gambut serta pengembangan wisata lahan gambut yang belum terlihat berjalan secara optimal. Dari program Desa Peduli gambut tersebut, Desa Pulantani merupakan salah satu Desa yang dalam prosesnya menjalankan program tersebut (DPG/Restorasi Gambut), akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang akan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Dalam pelaksanaan Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi gambut) masih terlihat belum optimal secara keseluruhan. Substansi dari pembangunan kawasannya sendiri dapat beragam opsi tergantung potensi ekonomi desa yang ada. Yang perlu digaris bawahi adalah jenis potensi yang dikembangkan harus dapat berkontribusi pada restorasi gambut.

Terkait dengan program Desa Pulantan merupakan salah satu desa yang berada pada tahap pelaksanaan program (DPG/Restorasi Gambut), namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya program tersebut. Namun secara keseluruhan nampaknya kurang optimal dalam melaksanakan program desa restorasi gambut (DPG/Restorasi Gambut). Isi dari pengembangan wilayah sendiri dapat mempunyai pilihan yang berbeda-beda tergantung dari potensi ekonomi kota tersebut. Perlu ditekankan bahwa jenis potensi yang akan dikembangkan harus mampu mendorong restorasi gambut. Beberapa fenomena masalah yang ada dapat dijelaskan bahwa minimnya atau belum optimalnya program Desa Peduli gambut (DPG/Restorasi Gambut) yang efektif dan efisien di Desa Pulantani berupa:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat tentang teknis pelaksanaan program DPG.
2. Kurangnya pendamping/fasilitator desa.
3. Minimnya jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan restorasi gambut.
4. Proses pencapaian hasil restorasi yang belum memenuhi target dimulai pelaksanaan program ini tahun 2018

Program dari Restorasi lahan Gambot seperti:

- a. Pembasahan 40 titik Somur bor
- b. Penanaman Kembali 500 bibit/hektar/21 hektar: 20.500 bibit
- c. Revitalisasi Ekonomi pelatihan bantuan peralatan kerajinan purun

Menurut Thomas R. Dye dalam (Setiawan, 2023) kebijakan publik merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang cakupannya sangat luas, penelitian hanya berfokus pada negara sebagai topik penelitian utama.

Kemudian menurut *Subianto*, dalam Dian Suluh Dewi Kusuma (2022: 122-123) menyebutkan terdapat beberapa unsur dalam proses implementasi yakni:

1. Proses implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindak lanjut dari program yang telah ditetapkan yang meliputi pengambilan keputusan, tahapan-tahapan strategis maupun operasional yang dilaksanakan agar terwujud suatu program kebijakan agar dapat terlaksana dan sesuai dengan sasaran kebijakan seperti yang telah ditentukan.
2. Proses implementasi dapat berhasil, kurang berhasil atau bisa saja gagal.

Hal ini dapat ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcome*, karena didalam proses tersebut melibatkan berbagai pihak yang tentu saja berpengaruh dan bersifat mendukung ataupun menghambat pencapaian target sasaran kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* dalam Sahya Anggara (2018:242- 243) menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut:

3. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
4. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
5. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
6. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).
7. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).
8. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi maupun tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan, serta intensitas sikap).

Menurut *Merilee S. Grindle: Content of Policy and Context of Implementation 1980* dalam Sahya Anggara (2018:254-257) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World 1980* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *context*-nya serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

- a. *Content of Policy* (Isi Kebijakan) Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut *Grindle* adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program. Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya, jenis kebijakan *redistribution* menurut kategori *Ripley* dan *Lowie*), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.
 - 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.
 - 3) Jangkauan perubahan yang diinginkan. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.
 - 4) Kedudukan pengambil keputusan. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasinya). Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.
 - 5) Pelaksana program. Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.
 - 6) Sumber daya yang disediakan. Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk

mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

- b. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi). Juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut *Grindle* adalah sebagai berikut:

- 1). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati *output*-nya.
- 2). Karakteristik lembaga dan penguasa Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai “siapa mendapatkan apa” (misalnya, penggusuran pasar tradisional menjadi supermarket) dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor.

Menurut *Mazmanian* dan *Sabatier* dalam Sahya Anggara (2018:257-251) ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Karakteristik Masalah (*tractability of the problem*)
- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan.
 - 2) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi program akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program berbeda.
 - 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
 - 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
 - 5) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
- b. Karakteristik Kebijakan atau undang - undang kebijakan (*ability of statute of structure implementation*)
- 1). Kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidak jelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi

dalam implementasi kebijakan.

- 2). Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoretis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, Walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
 - 3). Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
 - 4). Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar-institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - 5). Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - 6). Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan adalah komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.
 - 7). Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.
- b. Lingkungan Kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementations*).
- 1). Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan.
 - 2). Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik.
 - 3). Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, antara lain: (1) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan- badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan- badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan pada badan legislatif.
 - 4). Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (Agustino, 2020:154-159). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a). Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- 1). Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2). Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- 3). Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b). Sumber daya

Variabel kedua mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- 1). Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2). Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (a) informasi yang berhubungan mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (b) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- 3). Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan

proses impelementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenang-an. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektifitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan-annya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- 4). Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c). Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan impelementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah:

- 1). Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- 2). Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implemenatasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada 'pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil
- 3). Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (selfinterest) atau organisasi.

d). Struktur birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward yang mempengaruhi tingkat keberhasilan impelementasi kebijakan publik melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau tercalisasi karena kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber

daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- 1). Membuat Standar Operating Prosedures (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- 2). Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung-jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

METODE

Lokasi penelitian yaitu Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Pulantani berada di Jl H. Janawi Desa Pulantani Kode Pos 71472 di Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga terdapat informan yang berjumlah 13 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah meliputi reduksi, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Komunikasi

Transmisi penyaluran komunikasi tentang Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi Gambut) di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik karena dilihat dari jadwal sosialisasi yang belum ada dan spanduk yang belum terpasang. (Foto terlampir).

Penyampaiannya sudah disampaikan kepada masyarakat tetapi melihat desa tersebut banyak orang berusia tua jadi harus lebih sering diadakan sosialisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator kejelasan dalam implementasi program desa peduli gambut di Desa Pulantani belum berjalan dengan optimal.

konsistensi dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantan sudah cukup optimal namun hanya perlu adanya tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi guna meningkatkan pengoptimalan indicator tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia (staf) dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading kurang baik karena staf yang berjumlah satu orang sehingga dalam menjalankan program tersebut sering mengalami kegagalan, bahkan masyarakat masih perlu dilatih agar dapat memahami program tersebut tetapi karena fasilitatornya hanya satu

orang sehingga sering mengalami kegagalan dalam mengelola program tersebut. Jadi dalam kebijakan tersebut disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi.

Informasi dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading berjalan kurang baik, dilihat kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi yang relevan memang harus dilakukan berulang-ulang agar masyarakat paham, sehingga informasi yang disampaikan dengan baik.

Wewenang dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya fasilitator pendamping program tersebut di Desa Pulantani dan tidak dibina oleh BRG lagi tetapi untuk program lahan gambut tidak bisa diatasi baru menghubungi BRG.

Fasilitas pada implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading kurang baik, karena sarana menumbuk purun dan perahu mesin yang belum sepenuhnya mencukupi untuk kelengkapan fasilitas yang digunakan.

3. Disposisi

Pengangkatan birokrasi pada Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading sudah berjalan dengan baik, karena adanya kerjasama antara BRG dan fasilitator agar masyarakat dibina dan didampingi untuk menjaga lahan gambut dan masyarakat tahu seberapa pentingnya menjaga atau merawat lahan gambut.

Insentif dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan fasilitator/pendamping menerima insentif/gaji sebagai fasilitator program desa peduli gambut (DPG/restorasi gambut) di desa Pulantani.

4. Struktur Birokrasi

Rencana kerja yang jelas termasuk RKTL perbulan, langkah langkah apa saja yang dilakukan, output apa saja harus dicapai, outcome apa saja yang akan muncul kegiatan yang disusun sudah berjalan dengan baik. Namun belum adanya dokumen konkrit terkait *Standar Operating Procedures (SOP)* dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading sehingga perlunya evaluasi terkait kejelasan dokumen *Standar Operating Procedures (SOP)* dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani agar indikator *Standar Operating Procedures (SOP)* dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading ini dapat lebih optimal.

Fragmentasi dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading dapat dikatakan cukup baik, karena dengan adanya program lahan gambut tersebut menjaga lahan dari kebarakaran dari ilegal logging. Masyarakat juga terbantu cara mengatasi kebakaran hutan.

Faktor Penghambat dalam implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 1) Pengurangan Anggaran dan Pengalihan Anggaran
- 2) Tugas dan wewenang belum jelas
- 3) *Standar Operating Procedures (SOP)* belum ada
- 4) Sumber Daya Manusia (Staf)
- 5) Fasilitas

Faktor Pendorong dalam Implementasi Program Desa Peduli Gambut di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Konsistensi terkait pada program desa peduli gambut ini cukup baik dilihat penyampaianya sudah konsisten tetapi karena di Desa Pulantani ini masyarakatnya sebagian sudah lanjut usia jadi terbatasnya pemahaman tentang program ini. Sehingga mereka sangat sulit memahami bagaimana program ini dan cara menerapkannya seperti apa. Jadi harus menjelaskan lebih detail dan sabar agar mereka benar-benar paham.

Kejelasan pada Program Desa Peduli Gambut dikatakan cukup baik, tetapi masyarakat masih menginginkan pembinaan dan sosialisasi secara jelas. Penyampaianya sudah disampaikan kepada masyarakat tetapi melihat desa tersebut banyak orang berusia tua jadi harus lebih sering diadakan sosialisasi.

SIMPULAN

Implementasi Program Desa Peduli Gambut (DPG/Restorasi gambut) di Desa Pulantani Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara masih kurang baik disebabkan oleh: Pertama, Transmisi belum baik. Kedua, Staf dan fasilitasnya belum memadai. Ketiga, anggaran belum dipenuhi secara menyeluruh. Namun di samping itu, indikator disposisi dalam hal pengangkatan birokrat serta indikator fragmentasi pada implementasi program ini sudah berjalan dengan cukup baik. Kepada pemerintah daerah dan Kepala Badan Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap program yaitu dengan cara memonitoring lahan gambut dan wawancara dengan masyarakat pengrajin agar kegiatan program di desa pulantani bisa di lihat sejauh mana program itu pencapaiannya. Kepada Kepala desa Pulantani diharapkan bisa memberi anggaran agar sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan program tercukupi, seperti pembuatan akses jalan yang sulit dilewati, pelatihan untuk pengrajin, memperluas jangkauan area sumur bor. Kepada masyarakat desa Pulantani diharapkan bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan lahan gambut dan meningkatkan kepedulian dalam pengelolaan lahan gambut dengan cara menjaga lahan gambut agar tidak terjadi kebakaran karena gambut selain penopang kehidupan juga bernilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Anonim. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.



Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.

Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.

Saputra, T. *et al.* (2023a) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Saputra, T. *et al.* (2023b) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Setiawan, Irza. 2023. *Komunikasi dan Advokasi Kebijakan*. Amuntai : Hemat Publishing.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.